

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, *LEVERAGE*
DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP
VOLUNTARY DISCLOSURE PADA SEKTOR
INDUSTRI BARANG KONSUMSI**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :
ARIF FIRMAN FITRIANTO
2013310035

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2017

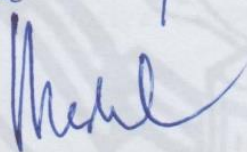
PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Arif Firman Fitrianto
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 Maret 1995
N.I.M : 2013310035
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage* dan
Konservatisme Akuntansi terhadap *Voluntary Disclosure* pada Sektor Industri Barang Konsumsi

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 16 Feb '17



(Dra. Gunasti Hudiwinarsih, Ak., M.Si.)

Co. Dosen Pembimbing,

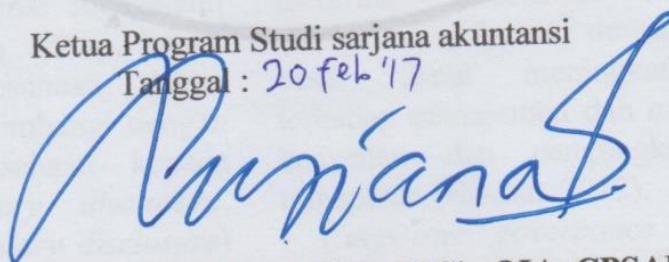
Tanggal : 16 Feb '17



(Agustina Ratna Dwiati, S.E., MSA)

Ketua Program Studi sarjana akuntansi

Tanggal : 20 Feb '17



(Dr. Luciana Spica Almilia S.E., M.Si., QIA, CPSAK)

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP VOLUNTARY DISCLOSURE PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI

Arif Firman Fitrianto
STIE Perbanas Surabaya
Email : arif.firman1203@gmail.com

Gunasti Hudiwinarsih
STIE Perbanas Surabaya
Email : astit@perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

Consumptive behaviour of Indonesian people in last 10 years was increased, it can to make companies in the consumer goods industry sector was growth significantly in every year. The companies growth need funding through loan nor issuing the stock. Companies funding needs could be met if stakeholders trust to the company. Stakeholders will be sure if the company is more transparent to stakeholders through voluntary disclosure. The study aimed to examine influenced of corporate governance which is proxy by the size of the board of commissioners, independent commissioners, audit committee, leverage and accounting conservatism in consumer goods industry sector. The type of the research is quantitative research which use sample of 128 companies listed on the Indonesian stock exchange in 2012-2015. Based on multiple regression linear analysis, the results of the research indicate corporate governance which is proxy by the size of the board of commissioners influencing voluntary disclosure. Board of commissioner supervision can make company more transparent through giving suggestion to board of directors to give more voluntary information to minimize the possibility of asymmetry of information between the stakeholders with the company management.

Key words : *Voluntary Disclosure, Corporate Governance, Leverage, Accounting Conservatism*

PENDAHULUAN

Perilaku konsumtif masyarakat Indonesia selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan sehingga membuat perusahaan sektor industri barang konsumsi mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap tahun. Kebutuhan pendanaan perusahaan dalam pengembangan usaha harus diimbangi dengan transparansi informasi perusahaan kepada stakeholder melalui *voluntary disclosure*. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas (Suwardjono, 2013 : 583).

Corporate governance diharapkan dapat menjamin tidak terjadinya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan para stakeholder. *Corporate governance* yang diproksikan oleh ukuran dewan komisaris memiliki keterkaitan dengan *voluntary disclosure*. Ukuran dewan komisaris yang besar dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan mengurangi masalah keagenan dan pengungkapan yang lebih transparan (Hassan, 2012).

Corporate governance yang diproksikan oleh komisaris independen juga memiliki keterkaitan dengan *voluntary disclosure*. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan

manajemen sehingga komisaris independen dapat memberikan masukan kepada direksi terkait pengungkapan secara sukarela yang mungkin tidak sependapat dengan dewan direksi (Poulan dan Ghozali, 2015).

Corporate governance yang diprosikan oleh komite audit memiliki keterkaitan dengan *voluntary disclosure*. Aktivitas komite audit yang tinggi pada perusahaan maka dapat mengurangi asimetri informasi dalam pengungkapan sukarela (Siagian dan Nugroho, 2012).

Rasio *Leverage* suatu perusahaan menunjukkan kondisi struktur modal perusahaan kepada *stakeholder*. Semakin transparan perusahaan maka dapat mengurangi keraguan pihak eksternal pada perusahaan tersebut (Purwanto dan Wikartika, 2014).

Konservatisme akuntansi mencegah terjadinya asimetri informasi antara pihak manajemen dengan pihak pemilik perusahaan. Konservatisme akuntansi dapat menghasilkan tingkat pengungkapan terbaik yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan investor untuk informasi yang tepat waktu dan akurat tentang hasil perusahaan yang ditargetkan oleh mereka sebagai investasi (Al Attar *et.al*, 2016).

Penelitian ini penting dilakukan karena masih ada perbedaan hasil penelitian terkait pengungkapan sukarela guna memperkuat hasil penelitian terdahulu untuk memberikan informasi yang akurat dan menganalisis fenomena pertumbuhan perusahaan sektor industri barang konsumsi melalui *voluntary disclosure*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *Corporate governance* yang diprosikan oleh Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit serta *Leverage* dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Voluntary Disclosure* sektor industri barang konsumsi dari tahun 2012 sampai tahun 2015.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan tentang masalah agensi yang timbul karena adanya konflik kepentingan investor, kreditur, dan manajer. Konflik yang dimaksud dapat dilihat dari kebijakan dividen, pendanaan, dan kebijakan investasi (Jensen and Meckling, 1976). Informasi tentang perusahaan lebih banyak diketahui oleh manajer (*agent*) sebagai pengelola dibandingkan pemilik perusahaan (*principal*). Sehingga manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan (Jensen and Meckling, 1976).

Hubungan antara prinsipal dan agen yang didalamnya agen bertindak atas nama dan kepentingan prinsipal dan atas tindakan tersebut agen mendapatkan imbalan tertentu (Suwardjono, 2013 : 485). Konflik antara agen dengan prinsipal dapat terjadi dikarenakan asimetri informasi dan *agency problem* antara agen dengan prinsipal.

Teori Legitimasi

Legitimasi adalah sumber yang menentukan keberadaan perusahaan, karena organisasi berusaha memastikan kinerja operasionalnya dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat (Dowling dan Pfefer dalam Fatoni, dkk : 2016). Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk terus-menerus meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat karena dipandang sesuai dengan norma-norma dan batasan masyarakat dimana perusahaan berada. Teori legitimasi didasari oleh adanya kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dengan menggunakan sumber ekonomi (Chariri dan Ghazali, 2007:412). Pada situasi ini perusahaan menggunakan laporan tahunan untuk menggambarkan kesan tanggungjawab terhadap masyarakat sehingga perusahaan akan diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga laba yang diperoleh perusahaan akan semakin meningkat. Hal tersebut berfungsi untuk mendorong dan

membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi.

Voluntary Disclosure

Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas (Suwardjono, 2013 : 583). Tujuan perusahaan melakukan pengungkapan secara sukarela adalah agar meningkatkan kredibilitas dan menunjukkan kesuksesan perusahaan melalui informasi yang disampaikan kepada *stakeholder*. Meningkatnya kredibilitas perusahaan melalui informasi yang disampaikan kepada *stakeholder* akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* pada perusahaan untuk memberi dana yang diperlukan perusahaan.

1. Corporate governance

Tata kelola organisasi (*corporate governance*) adalah menunjuk manajer untuk menjalankan perusahaan dalam aktivitas kesehariannya oleh para pemilik perusahaan dengan tujuan menjadikan perusahaan memiliki prestasi yang bagus dengan menunjukkan kinerja keuangan yang memuaskan (Handoko, dkk, 2012 : 4).

Ukuran Dewan komisaris

Dewan komisaris memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai pengawas secara kolektif dan memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Menurut penelitian Hassan (2012) Ukuran dewan komisaris yang besar dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan mengurangi masalah keagenan dan pengungkapan yang lebih transparan.

Corporate governance yang diproksikan oleh ukuran dewan komisaris memiliki keterkaitan dengan *voluntary disclosure*.

Dewan komisaris akan memberikan pengamanan informasi bagi *stakeholder* berupa transparansi informasi melalui pengungkapan sukarela agar tidak terjadi asimetri informasi. Semakin besar ukuran dewan komisaris suatu perusahaan maka semakin banyak informasi sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan tersebut.

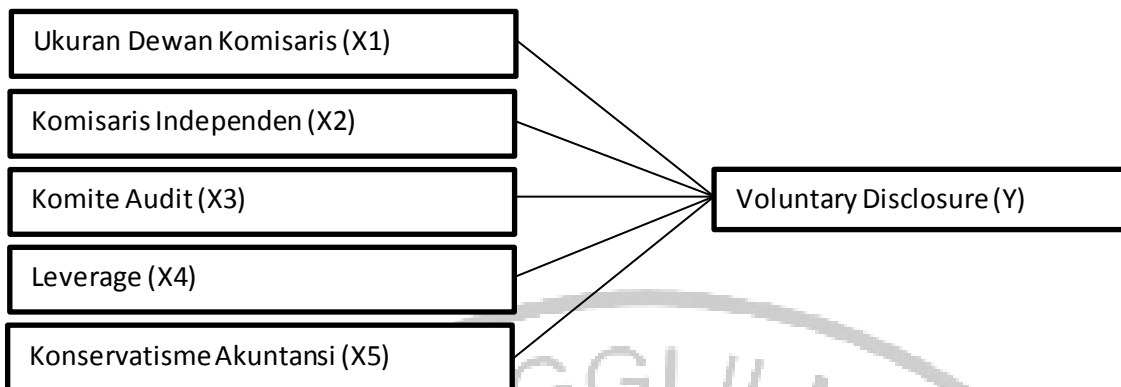
H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memperlakukan pemegang saham minoritas dengan jujur dan adil. Menurut penelitian Poulan dan Ghazali (2015) bahwa komisaris independen dapat memberikan masukan kepada direksi terkait pengungkapan secara sukarela yang mungkin tidak sependapat dengan dewan direksi.

Corporate governance yang diproksikan oleh komisaris independen memiliki keterkaitan dengan *voluntary disclosure*. Komisaris independen memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan untuk kepentingan *stakeholder* secara independen sehingga informasi sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan akan dijamin kebenarannya oleh komisaris independen. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris maka semakin banyak informasi sukarela yang diungkapkan.

H2 : Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*



Gambar 1
Kerangka Pemikiran Penelitian

Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk memeriksa dan mengawasi proses kendali internal perusahaan. Menurut penelitian Siagian dan Nugroho (2012) bahwa aktivitas komite audit yang tinggi pada perusahaan maka dapat mengurangi asimetri informasi dalam pengungkapan sukarela.

Corporate governance yang diprosikan oleh komite audit memiliki keterkaitan dengan *voluntary disclosure*. Informasi sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan akan dijamin kebenarannya karena telah diperiksa oleh komite audit perusahaan terlebih dahulu. Semakin banyak jumlah komite audit maka informasi *voluntary disclosure* semakin detail.

H3 : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*

Leverage

Rasio *leverage* menunjukkan seberapa jauh dana yang disediakan kreditur yang digunakan kelangsungan hidup perusahaan (Mamduh dan Halim, 2016 : 79). Tujuan perhitungan rasio *leverage* adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan tingginya resiko yang ditanggung oleh perusahaan.

Rasio *Leverage* suatu perusahaan menunjukkan kondisi struktur modal perusahaan kepada *stakeholder*. Kewajiban melaporkan informasi kepada pihak eksternal selain pengungkapan wajib juga dapat disertai dengan pengungkapan sukarela karena semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pula

tuntutan perusahaan untuk transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaan secara sukarela. Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pula tuntutan perusahaan untuk transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaan secara sukarela.

H4 : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*

2. Konservatisme Akuntansi

Konservatisme merupakan reaksi yang berhati-hati atas ketidakpastian yang ada, sedemikian rupa agar ketidakpastian tersebut dan risiko bisnis bisa dipertimbangkan dengan cukup memadai (Mamduh dan Halim, 2016 : 41). Praktik dari konsep ini pada penyusunan pelaporan keuangan adalah mengakui kerugian terlebih dahulu namun tidak mengakui pendapatan atau laba yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Konservatisme akuntansi mencegah terjadinya asimetri informasi antara pihak manajemen dengan pihak pemilik perusahaan. Konservatisme akuntansi cenderung melindungi investor dengan cara memberikan informasi yang akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam mengungkapkan informasi sukarela kepada *stakeholder*. Semakin tinggi tingkat konservatisme perusahaan maka semakin hati-hati perusahaan dalam mengungkapkan informasi sukarela terhadap *stakeholder*.

H5 : Konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*

Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat

dilihat pada gambar 1.

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan pada sektor industri barang konsumsi. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel sebagai berikut : (1) Perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015, (2) Data laporan keuangan dan annual report tersedia untuk periode 2012-2015, (3) Data laporan keuangan dalam bentuk mata uang rupiah.

Data Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah laporan keuangan dan annual report perusahaan manufaktur sub sektor Industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah strategi arsip. Data laporan keuangan dan annual report dapat diakses di (www.idx.co.id).

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *voluntary disclosure* sebagai variabel terikat dan *corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit, *leverage* dan konservatisme akuntansi sebagai variabel bebas.

Definisi Operasional Variabel

1. Voluntary Disclosure

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *voluntary disclosure*. *Voluntary disclosure* adalah informasi yang diungkapkan perusahaan selain informasi wajib (*mandatory disclosure*). Pengukuran *voluntary disclosure* dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah butir indeks pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Indeks pengungkapan perusahaan sampel dapat diperoleh dengan cara

sebagai berikut : (1) Memberi skor item pengungkapan dengan nilai 1 jika perusahaan melakukan pengungkapan dan memberi nilai nol jika perusahaan tidak mengungkapkan, (2) Menjumlahkan skor yang diperoleh dari setiap perusahaan untuk mendapatkan skor total. (3) Menghitung kelengkapan indeks pengungkapan dengan cara membagi total skor yang diperoleh setiap perusahaan dengan total skor yang ditentukan.

Indeks pengungkapan sukarela dapat dihitung dengan rumus :

$$IPS = \frac{N}{S}$$

Keterangan :

IPS : Indeks Pengungkapan Sukarela

N : Item kelengkapan pengungkapan sukarela yang disajikan perusahaan

S : Semua item kelengkapan pengungkapan sukarela yang ditentukan

2. Ukuran dewan komisaris

Variabel independen pada penelitian ini adalah Ukuran Dewan Komisaris. Variabel ini mengukur tingkat pengawasan terhadap manajemen dan mengurangi masalah keagenan dan pengungkapan yang lebih transparan. Pengukuran variabel ukuran dewan komisaris menggunakan perhitungan rumus :

Ukuran Dewan Komisaris = Dewan Komisaris Independen + Dewan Komisaris

3. Komisaris independen

Ada beberapa variabel independen penelitian ini adalah komisaris independen. Variabel ini mengukur independensi dewan komisaris sehingga direksi akan bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Pengukuran variabel proporsi komisaris independen menggunakan rumus :

Komisaris Independen =

$$\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

4. Komite Audit

Variabel independen selanjutnya pada penelitian ini adalah komite audit. Variabel ini diukur dengan menggunakan jumlah komite audit yang dibentuk oleh perusahaan. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit}$$

5. Leverage

Variabel independen selanjutnya pada penelitian ini adalah *leverage*. Variabel ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Variabel ini diukur dengan menggunakan Debt to Asset Ratio (DAR) yang didapatkan dari neraca dengan rumus :

$$\text{DAR (Debt to Asset Ratio)} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

6. Konservatisme Akuntansi

Variabel independen selanjutnya pada penelitian ini adalah konservatisme akuntansi. Variabel ini digunakan untuk mengukur tingkat kehati-hatian perusahaan dari ketidakpastian. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan market to book ratio yang didapatkan dengan rumus :

$$\text{Market to Book Ratio} = \frac{\text{Market value of common equity}}{\text{Book value of common equity}}$$

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Uji regresi berganda menggunakan Uji F, Koefisien Determinasi dan Uji t menggunakan aplikasi SPSS 20.

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data annual report tahun 2012 sampai 2015 perusahaan sektor industri barang konsumsi sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

2. Melakukan tabulasi data sesuai pengukuran variabel *voluntary disclosure*, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, *leverage* dan konservatisme akuntansi.

3. Melakukan Analisis Deskriptif.

4. Mengembangkan model penelitian

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y = *Voluntary disclosure*

a = koefisien konstanta

b_{1-5} = koefisien variabel independen

X₁ = Ukuran Dewan Komisaris

X₂ = Komisaris Independen

X₃ = Komite Audit

X₄ = *Leverage*

X₅ = Konservatisme Akuntansi

e = error item

5. Melakukan uji asumsi klasik

- a. Uji Normalitas

- b. Uji Multikolinearitas

- c. Uji Autokorelasi

- d. Uji Heteroskedastisitas

6. Melakukan uji hipotesis penelitian.

7. Melakukan uji F.

8. Melakukan uji koefisien determinasi.

9. Melakukan uji t.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan pemilihan sampel berdasarkan kriteria, menghasilkan 32 perusahaan dari 37 perusahaan yang sesuai dengan kriteria penelitian. Penelitian ini menggunakan data 4 tahun maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 128 perusahaan.

Analisis Deskriptif

1. *Voluntary Disclosure* (Y)

Voluntary disclosure adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Berdasarkan tabel 1 pada variabel *voluntary disclosure* dapat terlihat bahwa skor tertinggi sebesar 0,75 dimiliki oleh PT. INDOFARMA (Persero) Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini melakukan *voluntary disclosure* lebih banyak dari

perusahaan-perusahaan lain dalam sektor industri barang konsumsi karena perusahaan-perusahaan tersebut memiliki tata kelola perusahaan yang baik yang mendukung untuk memenuhi tanggungjawabnya kepada para stakeholder melalui pengungkapan informasi sukarela yang lebih banyak dari perusahaan-perusahaan lain untuk mengurangi asimetri

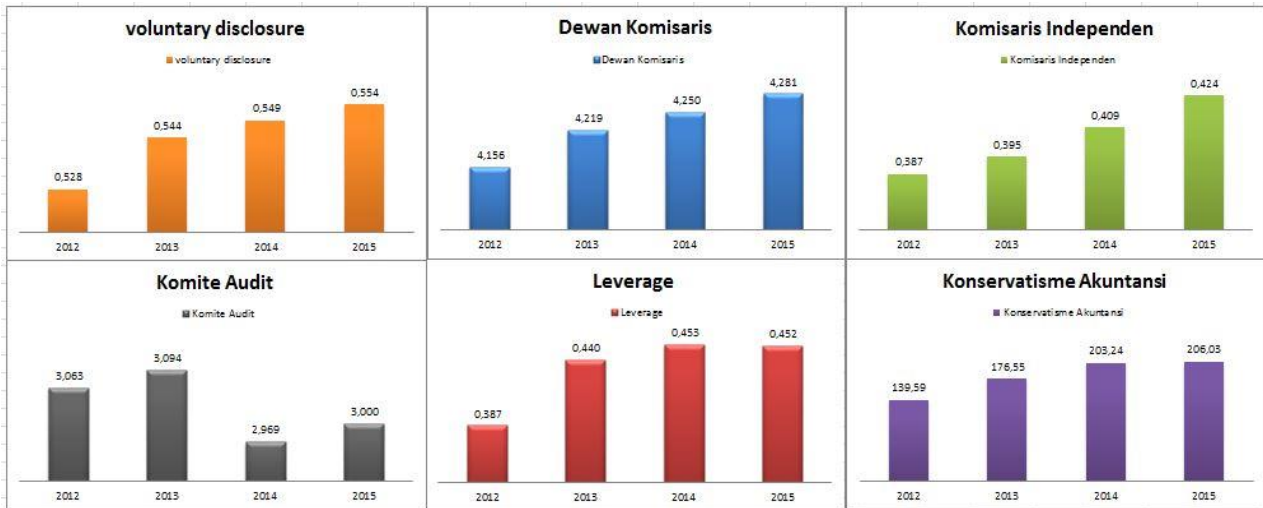
informasi dengan para *stakeholder*. Sedangkan skor *voluntary disclosure* yang paling rendah dimiliki oleh PT. Kedaung Indah Can Tbk dengan skor 0,25. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan *voluntary disclosure* paling rendah dibanding perusahaan-perusahaan lain.

Tabel 1
STATISTIK DESKRIPTIF SAMPEL PENELITIAN

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>VoluntaryDisclosure</i>	,25	,75	,5459	,12314
DewanKomisaris	2,00	9,00	4,2266	1,67056
KomisarisIndependen	,25	,80	,4064	,11325
KomiteAudit	2,00	5,00	3,0313	,45138
<i>Leverage</i>	,00100	1,25000	,4328203	,20922660
KonservatismeAkuntansi	,03	3700,00	181,3526	547,40032

Sumber : Hasil *output* SPSS, data diolah
Rata-rata skor *voluntary disclosure* dalam penelitian adalah sebesar 0,5459, hal ini menunjukkan bahwa *voluntary disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sektor industri barang konsumsi mencapai lebih dari separuh skor maksimal yaitu 1. Standar deviasi *voluntary disclosure* dalam penelitian sebesar 0,12314, karena nilai standar deviasi *voluntary disclosure* lebih kecil dari nilai rata-rata *voluntary disclosure* maka menunjukkan bahwa data *voluntary disclosure* tidak terlalu bervariasi atau bersifat homogen. Berdasarkan grafik pertumbuhan *voluntary disclosure* pada gambar 2, dapat disimpulkan bahwa

voluntary disclosure yang dilakukan perusahaan-perusahaan sektor industri barang konsumsi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perusahaan yang melakukan *voluntary disclosure* dengan skor diatas rata-rata berjumlah 13 perusahaan. Perusahaan yang melakukan *voluntary disclosure* dengan skor dibawah rata-rata berjumlah 19 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata *voluntary disclosure* yang dilakukan perusahaan-perusahaan di sektor industri barang konsumsi sudah cukup baik karena rata-rata skor *voluntary disclosure* lebih besar dari 0,5 pada skala 1.



Sumber : data diolah

Gambar 2
Pergerakan nilai rata-rata variabel dependen dan variabel independen

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai pengawas secara kolektif dan memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam pelaksanaan good corporate governance. Berdasarkan tabel 1 pada variabel ukuran dewan komisaris dapat terlihat bahwa jumlah dewan komisaris yang paling tinggi dimiliki oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dengan jumlah 9 orang, hal ini menunjukkan bahwa PT. Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki tata kelola perusahaan yang baik karena memiliki jumlah dewan komisaris yang besar yaitu 9 orang. Dengan jumlah dewan komisaris yang besar, maka tingkat pengawasan yang tinggi terhadap kinerja direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Jumlah dewan komisaris yang paling rendah dimiliki oleh PT. Siantar Top Tbk, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki jumlah dewan komisaris paling rendah dari perusahaan-perusahaan lain yaitu 2 orang. Rata-rata ukuran dewan komisaris yang dimiliki oleh sampel penelitian adalah sebesar 4 orang, jumlah tersebut sudah cukup ideal untuk perusahaan yang tidak memiliki risiko yang tinggi. Standar deviasi dari data penelitian ini adalah sebesar 1,67056. Nilai standar

deviasi masih lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-rata sehingga menunjukkan bahwa data ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini bersifat homogen.

Berdasarkan grafik pertumbuhan dewan komisaris pada gambar 2, dapat disimpulkan bahwa jumlah dewan komisaris perusahaan-perusahaan sektor industri barang konsumsi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perusahaan yang memiliki jumlah dewan komisaris yang diatas rata-rata berjumlah 13 perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah dewan komisaris dibawah rata-rata berjumlah 19 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah dewan komisaris yang dimiliki perusahaan-perusahaan di sektor industri barang konsumsi sudah baik karena jumlah dewan komisaris lebih besar dari jumlah minimal yang ditetapkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 33/POJK.04/2014 adalah 2 orang.

3. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memperlakukan

pemegang saham minoritas dengan jujur dan adil. Berdasarkan tabel 1 pada variabel Komisaris Independen dapat terlihat bahwa proporsi komisaris independen yang paling tinggi dimiliki oleh PT. Unilever Tbk dengan proporsi sebesar 0,8, hal ini menunjukkan bahwa PT. Unilever Tbk memiliki tata kelola perusahaan yang baik karena memiliki jumlah proporsi komisaris independen yang besar yaitu 0,8. Dengan proporsi komisaris independen yang besar, maka tingkat pengawasan yang tinggi terhadap kinerja direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan memperlakukan pemegang saham minoritas dengan jujur dan adil. Jumlah proporsi komisaris independen yang paling rendah dimiliki oleh PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki jumlah proporsi komisaris independen paling rendah dari perusahaan-perusahaan lain yaitu 0,25. Rata-rata proporsi komisaris independen yang dimiliki oleh sampel penelitian adalah sebesar 0,4064, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah komisaris independen yang berada dalam dewan komisaris mendekati setengahnya. Nilai standar deviasi data dalam penelitian ini sebesar 0,11325, karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata maka dapat disimpulkan bahwa data komisaris independen dalam penelitian ini bersifat homogen.

Berdasarkan grafik pertumbuhan komisaris independen pada gambar 2, dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen perusahaan-perusahaan sektor industri barang konsumsi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data diatas perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen diatas rata-rata berjumlah 11 perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen dibawah rata-rata berjumlah 21 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata proporsi komisaris independen yang dimiliki perusahaan-perusahaan di sektor industri barang konsumsi sudah baik

karena proporsi komisaris independen lebih besar dari jumlah minimal yang ditetapkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 33/POJK.04/2014 yaitu 30% dari jumlah seluruh dewan komisaris.

4. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk memeriksa dan mengawasi proses kendali internal perusahaan. Berdasarkan tabel 1 pada variabel komite audit dapat terlihat bahwa jumlah komite audit yang paling tinggi dimiliki oleh PT. INDOFARMA (Persero) Tbk dengan jumlah 5 orang, hal ini menunjukkan bahwa PT. INDOFARMA (Persero) Tbk memiliki tata kelola perusahaan yang baik karena memiliki jumlah komite audit yang besar yaitu 5 orang. Dengan jumlah komite audit yang besar, maka tingkat pemeriksaan dan pengawasan kegiatan operasional perusahaan juga tinggi. Jumlah komite audit yang paling rendah dimiliki oleh PT. Merk Sharp Dhome Pharma Tbk, PT. Martina Berto Tbk dan PT. Merck Tbk, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki jumlah komite audit paling rendah dari perusahaan-perusahaan lain yaitu 2 orang. Rata-rata jumlah komite audit yang dalam sampel penelitian ini adalah sebesar 3,0313, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah personil komite audit dalam sebuah perusahaan sebanyak 3 orang. Nilai standar deviasi jumlah komite audit dalam penelitian ini sebesar 0,45138, nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga menunjukkan bahwa data jumlah komite audit dalam penelitian ini bersifat homogen.

Berdasarkan grafik pertumbuhan komite audit pada gambar 2, dapat disimpulkan bahwa jumlah komite audit perusahaan-perusahaan sektor industri barang konsumsi stabil setiap tahunnya. Berdasarkan data diatas perusahaan yang memiliki jumlah komite audit diatas rata-rata berjumlah 4 perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah komite audit dibawah

rata-rata berjumlah 28 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan-perusahaan di sektor industri barang konsumsi sudah baik karena jumlah komite audit lebih besar dari jumlah minimal yang ditetapkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 55/POJK.04/2015 yaitu 3 orang.

5. *Leverage*

Rasio *leverage* menunjukkan seberapa jauh dana yang disediakan kreditur yang digunakan kelangsungan hidup perusahaan. Berdasarkan tabel 1 pada variabel *leverage* dapat terlihat bahwa tingkat *leverage* yang paling tinggi dimiliki oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk yaitu 1,25. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Bentoel Internasional Investama Tbk memiliki kondisi yang buruk dengan tingkat hutang yang paling tinggi dari perusahaan-perusahaan yang lain. Dengan tingkat *leverage* yang tinggi, maka tingkat kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi sukarela menjadi lebih tinggi. Tingkat *leverage* yang paling rendah dimiliki oleh PT. Merk Sharp Dhome Pharma Tbk, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tingkat hutang yang rendah dari perusahaan-perusahaan lain yaitu 0,001. Rata-rata tingkat *leverage* yang dimiliki oleh sampel penelitian adalah sebesar 0,4328203, dari hasil rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan-perusahaan pada sektor industri barang konsumsi mempunyai proporsi hutang sebesar 0,4328203 dalam pendanaan modal kerja maupun investasi mereka. Nilai standar deviasi data dalam penelitian ini sebesar 0,20922660. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga dapat disimpulkan bahwa data *leverage* dalam penelitian ini bersifat homogen.

Berdasarkan grafik pertumbuhan *leverage* pada gambar 2, dapat disimpulkan bahwa *leverage* perusahaan-perusahaan sektor industri barang konsumsi stabil setiap tahunnya. Berdasarkan data diatas perusahaan yang memiliki tingkat *leverage*

didas rata-rata berjumlah 17 perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* dibawah rata-rata berjumlah 15 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata *leverage* yang dimiliki perusahaan-perusahaan di sektor industri barang konsumsi sudah baik karena nilai lebih kecil *leverage* dari skala 1.

6. Konservatisme Akuntansi

Konservatisme merupakan sikap dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Berdasarkan tabel 1 pada variabel konservatisme akuntansi dapat terlihat bahwa tingkat konservatisme akuntansi yang paling tinggi dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia Tbk sebesar 3700, hal ini menunjukkan bahwa PT. Unilever Indonesia Tbk memiliki tingkat kehati-hatian yang besar dalam ketidakpastian dan risiko bisnis yaitu sebesar 3700. Dengan tingkat konservatisme akuntansi yang tinggi, maka tingkat kehati-hatian perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko bisnis cukup tinggi. Tingkat konservatisme akuntansi yang paling rendah dimiliki oleh PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat kehati-hatian dalam ketidakpastian dan risiko bisnis paling rendah dari perusahaan-perusahaan lain yaitu 0,03. Rata-rata tingkat konservatisme akuntansi yang dimiliki oleh sampel penelitian adalah sebesar 181,3526, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan pada sektor industri barang konsumsi memiliki tingkat konservatisme akuntansi yang tinggi. Nilai standar deviasi data dalam penelitian ini sebesar 547,40032. Nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa data konservatisme akuntansi dalam penelitian ini bersifat heterogen atau memiliki tingkat variasi yang tinggi.

Berdasarkan grafik pertumbuhan konservatisme akuntansi pada gambar 2, dapat disimpulkan bahwa konservatisme

akuntansi perusahaan-perusahaan sektor industri barang konsumsi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data diatas perusahaan yang memiliki tingkat konservatisme akuntansi diatas rata-rata berjumlah 5 perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat konservatisme akuntansi dibawah rata-rata berjumlah 27 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat konservatisme akuntansi yang dimiliki perusahaan-perusahaan di sektor industri barang konsumsi sudah baik karena nilai buku ekuitas perusahaan lebih kecil dari nilai pasar

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 7,052. Tingkat signifikansi sebesar 0,000, karena tingkat signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan merupakan model fit. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

Nilai koefisien determinasi (R^2) pada tabel *adjusted R square* sebesar 0,192 atau 19,2%. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 19,2% sedangkan sisanya sebesar 80,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Hasil koefisien determinasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada uji t berikut ini :

Pengaruh *Corporate governance* dengan proksi Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Voluntary Disclosure*

Dewan komisaris memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai pengawas secara kolektif dan memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Berdasarkan *agency theory* yang menjelaskan tentang masalah agensi yang timbul karena adanya konflik kepentingan investor, kreditur, dan manajer berupa asimetri informasi. Berdasarkan Teori Legitimasi, perusahaan berusaha menjaga transparansinya melalui *voluntary disclosure* kepada masyarakat bahwa perusahaan melakukan kegiatan operasional pada batas-batas dan norma-norma masyarakat. Semakin banyak jumlah dewan komisaris maka semakin baik tata kelola perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan *voluntary disclosure* semakin banyak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hal ini diduga berdasarkan data analisis deskriptif yang menunjukkan rata-rata variabel ukuran dewan komisaris mengalami peningkatan yang selaras dengan peningkatan *voluntary disclosure*. Pengawasan dewan komisaris menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang baik sehingga perusahaan dapat transparan melalui pengungkapan sukarela atau *voluntary disclosure*..

Tabel 2
Ringkasan Analisis Regresi Linear Berganda

No.	Uji Regresi	Variabel Dependen	Variabel Independen	Nilai		Keterangan
				F hitung/ B/ square	Sig./ R Adjusted R Square	
1	Uji F	<i>Voluntary Disclosure</i>	Ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit,	6,717	,000 ^b	Model fit

			<i>leverage</i> , konservatisme akuntansi			
2	Koefisien Determinasi	<i>Voluntary Disclosure</i>	Ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, <i>leverage</i> , konservatisme akuntansi	,216	,184	Variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen
			Ukuran dewan komisaris komisaris independen komite audit	4,916	,000	Signifikan
3	Uji t	<i>Voluntary Disclosure</i>	komite audit	-,703	,483	Tidak Signifikan
			<i>Leverage</i>	-,029	,977	Tidak Signifikan
			konservatisme akuntansi	-1,471	,144	Tidak Signifikan
				,448	,655	Tidak Signifikan

Sumber : data diolah

Perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai indeks pengungkapan sukarela yang tinggi juga memiliki jumlah dewan komisaris di atas rata-rata. Berdasarkan data tersebut dapat menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara ukuran dewan komisaris dengan *voluntary disclosure*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Poulan dan Ghozali (2015) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Berdasarkan hasil penelitian ini dengan ukuran dewan komisaris yang besar, pengawasan dewan komisaris terhadap dewan direksi dalam pengungkapan sukarela akan semakin besar pula.

Pengaruh *Corporate governance* dengan proksi Komisaris Independen terhadap *Voluntary Disclosure*

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen yang memiliki tugas dan

tanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memperlakukan pemegang saham minoritas dengan jujur dan adil. Berdasarkan *agency theory* yang menjelaskan tentang masalah agensi yang timbul karena adanya konflik kepentingan investor, kreditor, dan manajer berupa asimetri informasi. Berdasarkan Teori Legitimasi, perusahaan berusaha menjaga transparansinya melalui *voluntary disclosure* kepada masyarakat bahwa perusahaan melakukan kegiatan operasional pada batas-batas dan norma-norma masyarakat. Semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin baik tata kelola perusahaan sehingga *voluntary disclosure* yang diungkapkan perusahaan semakin banyak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hal ini diduga berdasarkan data analisis deskriptif yang menunjukkan rata-rata proporsi komisaris

independen mengalami peningkatan yang tidak selaras dengan peningkatan *voluntary disclosure*. Perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai indeks pengungkapan sukarela yang tinggi tidak memiliki proporsi komisaris independen yang besar. Berdasarkan data tersebut dapat menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan antara komisaris independen dengan *voluntary disclosure*. Alasan lain yang menyebabkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure* adalah pengawasan dan rekomendasi yang diberikan oleh komisaris independen pada terhadap *voluntary disclosure* belum mampu meyakinkan *stakeholder* bahwa perusahaan sudah dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian dan Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*.

Pengaruh *Corporate governance* dengan proksi Komite Audit terhadap *Voluntary Disclosure*

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk memeriksa dan mengawasi proses kendali internal perusahaan. Berdasarkan *agency theory* yang menjelaskan tentang masalah agensi yang timbul karena adanya konflik kepentingan investor, kreditor, dan manajer berupa asimetri informasi. Berdasarkan Teori Legitimasi, perusahaan berusaha menjaga transparansinya melalui *voluntary disclosure* kepada masyarakat bahwa perusahaan melakukan kegiatan operasional pada batas-batas dan norma-norma masyarakat. Semakin banyak jumlah personil komite audit maka tata kelola perusahaan semakin baik sehingga *voluntary disclosure* yang dilakukan perusahaan semakin banyak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Hal ini diduga berdasarkan data analisis deskriptif yang menunjukkan rata-rata variabel komite audit berada pada nilai yang

konstan dan tidak selaras dengan rata-rata nilai *voluntary disclosure* yang selalu meningkat setiap tahun. Tidak adanya keterkaitan antara komite audit dengan *voluntary disclosure* dikarenakan rata-rata jumlah komite audit berada pada nilai yang konstan tidak dapat mempengaruhi skor indeks pengungkapan sukarela yang terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan hasil penelitian ini dengan rata-rata jumlah komite audit yang besar, belum dapat membuat perusahaan melakukan *voluntary disclosure* secara maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan komite audit hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kajian finansial, manajemen risiko dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lainnya agar tidak terjadi asimetri informasi terkait informasi keuangan antara *stakeholder* dengan manajemen perusahaan sehingga komite audit tidak terlalu mementingkan *voluntary disclosure* dalam lingkup pekerjaannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Poulan dan Ghazali (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata jumlah komite audit yang besar, belum dapat membuat perusahaan melakukan *voluntary disclosure* secara maksimal.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Voluntary Disclosure*

Rasio *Leverage* suatu perusahaan menunjukkan kondisi struktur modal perusahaan kepada *stakeholder*. Berdasarkan *agency theory* yang menjelaskan tentang masalah agensi yang timbul karena adanya konflik kepentingan investor, kreditor, dan manajer berupa asimetri informasi. Berdasarkan Teori Legitimasi, perusahaan berusaha menjaga transparansinya melalui *voluntary disclosure* kepada masyarakat bahwa perusahaan melakukan kegiatan operasional pada batas-batas dan norma-norma masyarakat. Rasio *leverage* yang baik dapat dilihat dari tingginya nilai perbandingan antara total hutang yang dimiliki

perusahaan dengan total aset dari perusahaan. Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pula tuntutan perusahaan untuk transparan sehingga perusahaan akan melakukan *voluntary disclosure* semakin banyak pula.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Hal ini diduga berdasarkan data analisis deskriptif yang menunjukkan rata-rata variabel *leverage* mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak selaras dengan rata-rata nilai *voluntary disclosure* yang selalu meningkat setiap tahun. Berdasarkan hasil penelitian ini dengan rata-rata *leverage* yang besar, belum dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *voluntary disclosure* secara maksimal meskipun perusahaan memiliki tanggungjawab untuk memberikan informasi keuangan perusahaan kepada pemberi pinjaman atau bank. Kondisi ini juga didukung dengan kebijakan bank atau pemberi pinjaman hanya memperhitungkan risiko kredit dari kemampuan finansial perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan dan rasio-rasio keuangan yang mendukung perhitungan risiko yang dibutuhkan oleh bank atau pemberi pinjaman. Informasi yang terkandung dalam *voluntary disclosure* pada laporan tahunan perusahaan belum menjadi bahan pertimbangan bank atau pemberi pinjaman untuk menghitung risiko kredit perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Prijanto dan Widianingsih (2012) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*.

Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Voluntary Disclosure

Konservatisme akuntansi mencegah terjadinya asimetri informasi antara pihak manajemen dengan pihak pemilik perusahaan. Berdasarkan *agency theory* yang menjelaskan tentang masalah agensi yang timbul karena adanya konflik kepentingan investor, kreditur, dan manajer berupa asimetri informasi. Konservatisme akuntansi cenderung melindungi investor dengan cara memberikan

informasi yang akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam mengungkapkan informasi sukarela kepada stakeholder. Berdasarkan *agency theory* yang menjelaskan tentang masalah agensi yang timbul karena adanya konflik kepentingan investor, kreditur, dan manajer berupa asimetri informasi. Berdasarkan Teori Legitimasi, perusahaan berusaha menjaga transparansinya melalui *voluntary disclosure* kepada masyarakat bahwa perusahaan melakukan kegiatan operasional pada batas-batas dan norma-norma masyarakat. Semakin tinggi tingkat konservatisme perusahaan maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melindungi investor pada ketidakpastian sehingga semakin banyak informasi sukarela yang diungkapkan.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Hal ini diduga berdasarkan data analisis deskriptif yang menunjukkan rata-rata variabel konservatisme akuntansi mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak selaras dengan rata-rata nilai *voluntary disclosure* yang selalu meningkat setiap tahun. Berdasarkan hasil penelitian ini dengan rata-rata konservatisme akuntansi yang besar, belum dapat membuat perusahaan melakukan *voluntary disclosure* secara maksimal meskipun perusahaan memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam mengungkapkan informasi kepada stakeholder agar tidak terjadi asimetri informasi antara stakeholder dengan manajemen perusahaan. Hal ini terjadi dikarenakan penilaian terkait tingkat kehati-hatian perusahaan dalam mengungkapkan informasi sukarela atau *voluntary disclosure* oleh stakeholder masih belum dianggap penting. Karena stakeholder hanya memperhitungkan kajian finansial perusahaan agar keputusan yang dibuat oleh stakeholder bersifat rasional.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zalloum *et al* (2013) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Secara umum, kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. *Corporate governance* dengan proksi ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Rata-rata peningkatan jumlah dewan komisaris yang selaras dengan peningkatan skor rata-rata indeks pengungkapan sukarela.
2. *Corporate governance* dengan proksi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Rata-rata peningkatan jumlah proporsi komisaris independen yang tidak selaras dengan peningkatan skor rata-rata indeks pengungkapan sukarela.
3. *Corporate governance* dengan proksi komite audit tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Komite audit hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kajian finansial, manajemen risiko dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lainnya
4. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Informasi yang terkandung dalam *voluntary disclosure* pada laporan tahunan perusahaan belum menjadi bahan pertimbangan bank atau pemberi pinjaman untuk menghitung risiko kredit perusahaan.
5. Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Rata-rata tingkat konservatisme akuntansi yang meningkat dan menurun dipengaruhi oleh nilai pasar saham tidak dapat mempengaruhi skor indeks pengungkapan sukarela yang terus meningkat setiap tahun.

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 18,4%.
- 2) Penelitian ini menggunakan indeks

pengungkapan sukarela dari penelitian yang dilakukan di Malaysia sehingga ada beberapa item pengungkapan sukarela yang tidak ditemukan di Indonesia.

- 3) Penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan sukarela yang diluar peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) tahun 2012 sedangkan saat ini sudah ada peraturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diajukan saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebaiknya penelitian selanjutnya mengembangkan dalam penggunaan variabel independen dengan menggunakan variabel independen baru yang berpotensi dapat mempengaruhi variabel *voluntary disclosure*., Misalnya KAP big four, Kepemilikan Publik dan Proprietary Cost.
- 2) Sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan indeks pengungkapan sukarela yang berisi item pengungkapan sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.
- 3) Sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan indeks pengungkapan sukarela yang diluar peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Attar *et.al.* 2016. "Measuring the Conservatism Level in the Accounting Policies and Its Effect on the Financial Information Disclosure Quality in the Jordanian Commercial Banks". *Journal of Management and Sustainability*. Vol. 6, No. 3, Pp 91-105
- Chairi dan Ghazali, achmad. 2007. *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: Andi
- Fatoni, Rita Andini, dan Kharis Rahardjo. 2016. Pengaruh Kepemilikan Publik, *Return On Equity, Current Ratio, Umur Perusahaan, dan Company Size Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility* pada perusahaan *Real Estate and Property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. *Journal Of*

Accounting. Vol. 2

- Hanafi, Mamduh dan Halim, Abdul. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kelima. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Handoko, T.H., Indarti, N., dan Almahendra, R. 2012. *Manajemen Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Haron, M. Akhtaruddin Hasnah. 2010, "Board ownership, audit committees' effectiveness, and corporate voluntary disclosures". *Asian Review of Accounting*. Vol. 18 Iss 3 pp. 245 - 259
- Hassan, M.K. 2012. *Corporate governance Characteristic and Voluntary Disclosure: The Case of UEA Listed Corporations. The 2013 IBEA, International Conference on Business, Economics, and Accounting (March)*. Bangkok-Thailand
- Jensen MC., and Meckling WH., 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics* (Oktober), Pp193-228.
- Poulan, Godeliva. dan Imam Ghozali. 2015. "Pengaruh Mekanisme Corporate governance dan Kondisi Financial Distress Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Perusahaan". *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. Vol. 4, No. 1, Pp 39-56
- Purwanto, Eko dan Ira Wikartika. 2014. "Analisis Voluntary Disclosure Perusahaan Telekomunikasi Di BeI". *Jurnal Neo-Bis*. Vol. 8, No. 2, Pp 101-115
- Siagian, Gedie E. dan Paskah Ika Nugroho. 2012. "Pengaruh Struktur Dan Aktivitas Good Corporate governance Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Secara Sukarela Pada Website Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 1, No. 2, Pp 1-11
- Suwardjono. 2013. Teori Akuntansi "Perekayasaan Laporan Keuangan". Yogyakarta : BPFEE-YOGYAKARTA
- <http://koran.bisnis.com/read/20160711/244/564672/evolusi-sektor-konsumsi-diakses-tanggal-01-November-2016>
- www.ojk.go.id diakses tanggal 10 Desember 2016

Lampiran

ITEM PENGUNGKAPAN SUKARELA

1	Output fisik dan pemanfaatan kapasitas perusahaan	21	Pembahasan hasil operasi perusahaan selama beberapa tahun terakhir
2	Laporan aktivitas prinsipal	22	Penjelasan yang diberikan untuk perubahan dalam penjualan
3	Pernyataan strategi dan tujuan perusahaan	23	Penjelasan yang diberikan untuk perubahan laba operasional/ laba bersih
4	Tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan strategi perusahaan	24	Diskusi posisi kompetitif perusahaan
5	Strategi untuk meningkatkan kinerja.	25	Diskusi pengembangan produk baru
6	Saham yang dimiliki oleh direksi perusahaan	26	Penjelasan yang diberikan untuk perubahan dalam pendapatan bunga atau beban bunga
7	Usia direksi	27	Proyeksi penjualan masa depan
8	Pengalaman direksi	28	Perkiraan arus kas
9	Posisi atau kantor yang dimiliki oleh direktur eksekutif	29	Kategori karyawan berdasarkan jenis kelamin
10	Remunerasi direksi	30	Jumlah yang dibelanjakan untuk pelatihan
11	Sumber daya dari bahan baku	31	Kebijakan pelatihan karyawan
12	Kebijakan pembagian deviden	32	Jumlah karyawan yang terlatih
13	Laba ditahan	33	Informasi tentang langkah-langkah keamanan
14	Harga jual per unit	34	Program perlindungan lingkungan.
15	Pertumbuhan pada unit yang terjual	35	Informasi tentang layanan masyarakat.
16	Informasi periklanan	36	Penyajian grafis dari informasi keuangan
17	Nilai aset berwujud per saham	37	Penyajian grafis dari informasi non-keuangan
18	Rasio keuangan	38	Partisipasi dalam kampanye sosial pemerintah
19	Deviden per saham biasa untuk periode ini	39	Kontribusi perusahaan terhadap ekonomi nasional
20	Pasar utama dari produk	40	Diskusi penelitian dan pengembangan produk masa depan

Sumber : Haron (2010)